

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN PADA KOMPLIKASI
EKSPULSI DALAM PEMASANGAN *IUD* OLEH BIDAN PRAKTIK
MANDIRI DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

AMRI WULANDARI

13.93.0073

kepada
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2016

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN PADA KOMPLIKASI EKSPULSI DALAM PEMASANGAN *IUD* OLEH BIDAN PRAKTIK MANDIRI DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

diajukan oleh :

AMRI WULANDARI

13.93.0073

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

PJ. Soepratignja, SH. Sp.N

Tanggal:

Pembimbing Pendamping

dr. C Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH

Tanggal:

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN PADA KOMPLIKASI EKSPULSI DALAM PEMASANGAN *IUD* OLEH BIDAN PRAKTIK MANDIRI DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
AMRI WULANDARI
13.93.0073

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal:

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji Lain

PJ. Soepratignja, SH. Sp.N

Valentinus Suroto, SH.,M.Hum

Pembimbing Pendamping

dr. C Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum
Tanggal

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Pada Komplikasi Ekspulsi Dalam Pemasangan IUD Oleh Bidan Praktik Mandiri Di Wilayah Kota Yogyakarta”**.

Dalam penulisan tesis ini, penulis ingin menggambarkan tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada bidan praktik mandiri jika terjadi kasus komplikasi ekspulsi dalam pemasangan IUD di Kota Yogyakarta, dimana keluarga berencana merupakan Program Pemerintah dengan tujuan untuk pengendalian kuantitas penduduk dan menciptakan keluarga yang berkualitas. Pelayanan Keluarga berencana merupakan kompetensi bidan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian bahwa kepastian hukum ada, bahwa bidan tidak boleh melakukan pemasangan *Intra Uteri Device* (IUD) karena tidak ada surat tugas, untuk kemanfaatan bahwa akseptor yang mengalami kegagalan menyampaikan lebih senang pelayanan di bidan dengan alasan karena biaya murah dan tidak merasa tabu karena sesama jenis dan masyarakat membutuhkan bidan, untuk keadilan bahwa seluruh perempuan berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan reproduksi khususnya keluarga berencana, dan untuk tenaga keesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum. Tetapi untuk kemanfaatan dan keadilan untuk bidan dan masyarakat belum terpenuhi.

Tesis ini disusun sebagai syarat mencapai derajat sarjana S-2 dan akhir menempuh pendidikan Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widyanarko, M.Sc, selaku Rektor UNIKA Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Lindayani, MP, selaku Dekan Fakultas Pascasarjana UNIKA Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang.
4. PJ. Soepratignja, SH, Sp.N selaku dosen pembimbing utama dalam tesis ini.
5. dr. C Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH selaku dosen pembimbing pendamping dalam tesis ini.
6. Valentinus Suroto, SH.,M.Hum selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen yang selama perkuliahan memberikan ilmu kepada penulis di Program Studi Magister Hukum Kesehatan.
8. Seluruh Keluarga yang memberikan doa, dukungan dan motivasi sehingga terselesaikannya tesis ini.
9. Teman-teman angkatan 20 yang saling memberikan semangat dan dukungan.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan informasi dan masukan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun sehingga dapat membuat tesis ini lebih baik.

Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pembaca. Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, aamiin.

Semarang, November 2016

Amri Wulandari

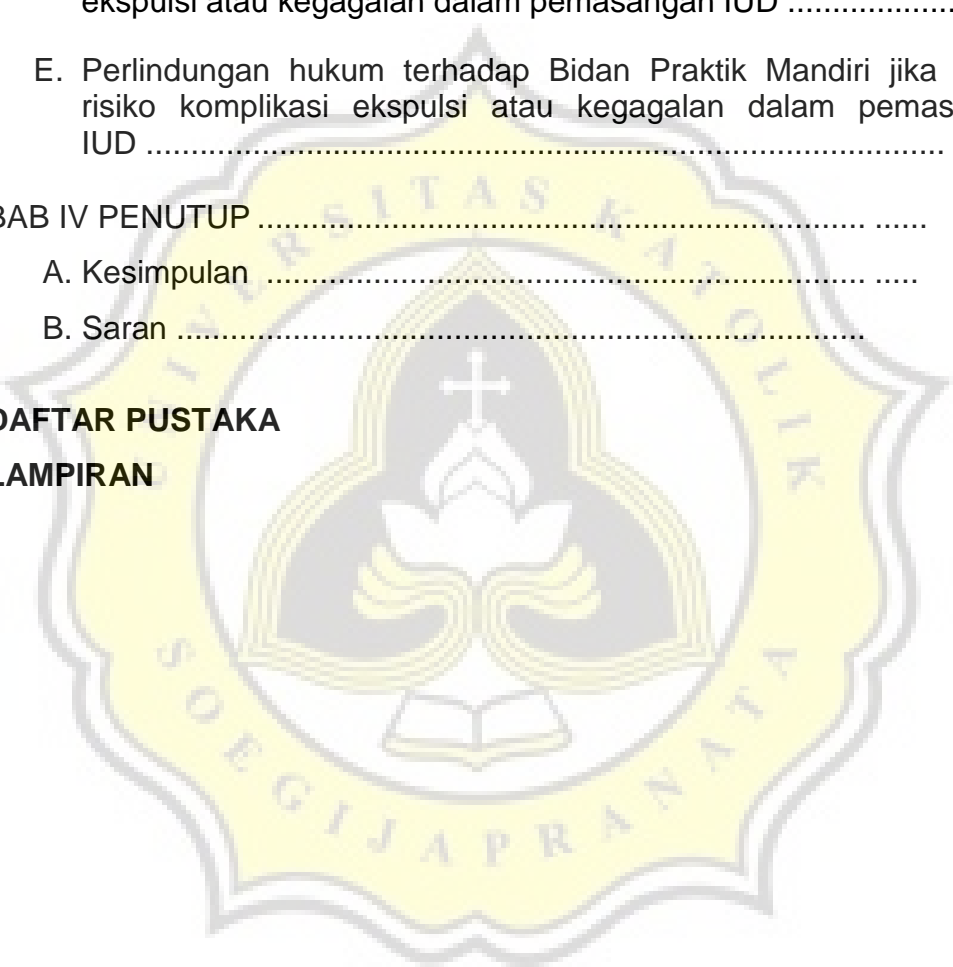
DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	i
Halaman persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	vii
Daftar Lampiran	ix
Halaman Pernyataan	x
Abstrak	xi
<i>Abstrac</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Kerangka Konsep	15
G. Penyajian Tesis.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kebijakan Pemerintahang Tentang Keluarga Berencana ..	17
B. Bidan	21
C. Metode Kontrasepsi	30
D. <i>Informed Conccent</i>	46
E. Keselamatan Pasien	48
F. Perlindungan Hukum	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Gambaran umum Pelayanan Kesehatan di Kota Yogyakarta	56

B. Latar belakang pemberian wewenang kepada Bidan Praktik Mandiri dalam melakukan pemasangan IUD di Kota Yogyakarta	58
C. Pandangan dokter terhadap Bidan Praktik Mandiri yang memberikan kontrasepsi selain kondom	66
D. Upaya Bidan Praktik Mandiri dalam mengurangi risiko komplikasi ekspulsi atau kegagalan dalam pemasangan IUD	69
E. Perlindungan hukum terhadap Bidan Praktik Mandiri jika terjadi risiko komplikasi ekspulsi atau kegagalan dalam pemasangan IUD	78
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permohonan Menjadi Informan
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jawa Tengah
- Lampiran 5 Surat Rekomendasi Ijin Penelitian Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
- Lampiran 6 Surat Ijin Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
- Lampiran 7 Surat Balasan Ijin Penelitian
- Lampiran 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Ijin Tenaga Kesehatan



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Amri Wulandari, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 19.03.0073,

Menyatakan:

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, November 2016

Amri Wulandari

Abstrak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN PADA KOMPLIKASI EKSPULSI DALAM PEMASANGAN IUD OLEH BIDAN PRAKTIK MANDIRI DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Kesehatan reproduksi perempuan merupakan hak asasi manusia bagi setiap perempuan, dimana perempuan berhak mendapatkan pelayanan yang komprehensif. Agar mencapai keluarga yang sejahtera dan berkualitas maka diperlukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) khususnya metode jangka panjang. Pelayanan Keluarga Berencana diberikan oleh tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan. Untuk bidan praktik mandiri sesuai dengan Permenkes No 1464 Tahun 2010, harus mendapatkan surat tugas dari pemerintah Kota/propinsi/kabupaten untuk menjalankan program pemerintah.

Metode penelitian adalah Yuridis Sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemberian wewenang kepada Bidan Praktik Mandiri dalam melakukan pemasangan IUD di Kota Yogyakarta, pandangan dokter terhadap Bidan Praktik Mandiri yang memberikan kontrasepsi selain kondom, upaya Bidan Praktik Mandiri dalam mengurangi risiko komplikasi ekspulsi atau kegagalan dalam pemasangan IUD, dan bentuk perlindungan hukum terhadap Bidan Praktik Mandiri jika terjadi risiko komplikasi ekspulsi atau kegagalan dalam pemasangan IUD. Responden dalam penelitian ini adalah 3 akseptor, 11 Bidan Praktik Mandiri, 4 Dokter, 1 PC IBI, 2 bagian dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian didapatkan data pada Tahun 2015 akseptor baru sebanyak 789 akseptor, serta kegagalan sejumlah 11 akseptor, yang mengalami komplikasi sejumlah 5 akseptor. Seluruh bidan praktik mandiri di Kota Yogyakarta memberikan pelayanan keluarga berencana khususnya IUD, tanpa diberikan surat tugas dari Pemerintah Kota/Propinsi/Kebupaten untuk menjalankan program pemerintah, sehingga tidak ada kewenangan karena hal ini bertentangan dengan Permenkes No 1464 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (1), dan kepastian hukum ada, bahwa bidan tidak boleh melakukan pemasangan IUD karena tidak mendapatkan surat tugas, tetapi untuk kemanfaatan dan keadilan untuk bidan dan masyarakat belum terpenuhi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Komplikasi Ekspulsi Pemasangan IUD, Bidan Praktik Mandiri

Abstract

LEGAL PROTECTION OF MIDWIVES OF COMPLICATIONS IN FITTING IUD expulsion MIDWIVES PRACTICE INDEPENDENTLY IN THE CITY YOGYAKARTA

Women's reproductive health is a human right for all women, where women are entitled to a comprehensive range of services. In order to achieve a prosperous family and the required quality of service Family Planning (FP), particularly long-term methods. Family Planning services provided by health professionals, especially doctors and midwives. For midwives practice independently according to Health Minister Regulation No. 1464 of 2010, must obtain a letter of assignment from the City Government / provinces / districts to run government programs.

Sociological research methods is juridical, with descriptive analytic specifications. This study aims to determine the background of granting authority to the Midwife Practice Independently in conducting IUD in the city of Yogyakarta, view the doctor against Midwife Practice Independently , which provides contraception other than condoms, efforts Midwife Practice Independently in reducing the risk of complications expulsion or failure in IUD insertion, and forms legal protection of the Midwife Practice Independently if there is risk of complications or failure in the expulsion of IUD. Respondents in this study is three acceptors, 11 Midwife Practice Independently, 4 doctors, 1 PC IBI, 2 parts of Yogyakarta City Health department.

The result showed the data on new acceptors in 2015 as many as 789 acceptors, as well as the failure of a number of acceptors 11, with complications of a number of acceptors 5. The whole midwives practice independently in Yogyakarta provide family planning services, especially IUD, without given a letter of assignment from the City / Province / District to run government programs, so there is no authority because it is contrary to Minister Regulation No. 1464 of 2010 Article 15 paragraph (1), and legal certainty exists, that midwives should not be doing IUD because they do not get a letter of assignment, but for expediency and equity for midwives and community have not been met.

Keywords: Legal Protection, complications IUD expulsion Installation, Midwife Practice independently